

PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN**SAPTI EKA PRATIWI**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-Mail : saptika31@gmail.com

Sumarno

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Demokrasi Terpimpin merupakan pemikiran Presiden Soekarno yang dianggap dapat mengatasi segala kemelut yang di akibatkan oleh sistem multipartai di Indonesia. Banyaknya partai politik yang saling menjatuhkan dalam kabinet menjadikan pemerintahan tidak stabil dan menghambat terlaksananya program kabinet. Perpecahan yang terjadi di dalam pemerintahan karena sistem multipartai ini bahkan lebih parah dari konflik ras dan keagamaan. Sehingga pembubaran partai adalah agenda utama dalam menjalankan demokrasi terpimpin.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana situasi politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, 2) Mengapa setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1960 terjadi pembubaran partai, 3) Apa dampak pembubaran partai bagi kehidupan politik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan situasi politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, untuk menganalisis hubungan Dekrit Presiden 5 Juli 1960 dengan pembubaran partai, dan untuk menganalisis dampak pembubaran partai bagi kehidupan politik di Indonesia.

Penelitian sejarah ini menggunakan metode penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik, interpretasi hingga historiografi. Penelitian sejarah yang benar tidak terlepas dari proses heuristik yakni penelusuran sumber. Penelusuran sumber primer seperti Perundang-undangan antara lain PP No.6 Tahun 1960, Kepres No.200 tahun 1960, Penpres N0.7 tahun 1960 dan sumber pemberitaan media cetak sezaman dari surat-surat kabar *Bintang Timoer, Abadi, Pikiran Rakjat, Nasional dan Sket masa* pada tahun 1959-1966. Penelusuran sumber sekunder berupa buku-buku referensi yang terkait dengan pembubaran partai politik Masyumi dan PSI pada masa demokrasi terpimpin.

Berdasarkan sumber yang di dapat penelitian ini mendapatkan hasil sebagai berikut. 1) Situasi politik mengalami kemacetan akibat sistem multipartai yang menyebabkan sering jatuhnya kabinet, terjadi perbedaan ideologi antara presiden yang pro PKI dengan Partai Masyumi dan PSI, terjadi kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah yang menyebabkan peristiwa PRRI 2) Kekuasaan presiden semakin besar sejak dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1960 sebagai awal demokrasi terpimpin, presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI yang tidak setuju dengan konsep demokrasi terpimpin dan beberapa pemimpin terlibat dalam PRRI. 3) Dampak politik yang ditimbulkan dari pembubaran partai adalah adanya penyimpangan konstitusi yang dilakukan presiden saat membubarkan Masyumi dan PSI dan semakin kuatnya pengaruh PKI dalam pemerintahan, dampak ekonomi Indonesia mengalami devisa anggaran karena banyaknya pengeluaran untuk menumpas anggota PRRI bersamaan dengan Indonesia keluar dari PBB, sehingga Indonesia tidak mendapat bantuan investor dan IMF, serta akhirnya pimpinan Masyumi dan PSI yang terlibat PRRI ditangkap dan pemimpin yang tidak terlibat juga dipenjara.

Kata Kunci : Demokrasi Terpimpin, Pembubaran Partai, Partai Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI)

Abstract

Demokrasi terpimpin is the thinking of President Sukarno, who is considered to cope with all the turmoil that causes the multiparty system in Indonesia. The number of political parties that each drop in the cabinet make the government unstable and prevent the implementation of the cabinet's program. The split in the government since the multiparty system was even worse than racial and religious conflicts. So the dissolution of the party was the main agenda in the run guided democracy.

Based on the background of the problem, then the problem formulation of this study as follows: 1) How is the political situation in Indonesia during the guided democracy, 2) Why after the Dektit Presiden 5 Juli 1960 of the dissolution of the party, 3) What is the impact of the dissolution of the party for political life in Indonesia , The purpose of this study is to describe the political situation in Indonesia during the guided democracy, to analyze the relationship between Presidential Decree of July 5, 1960 with the dissolution of the party, and to analyze the impact of the dissolution of the party for political life in Indonesia.

This historical research using methods of historical research includes heuristics, criticism, interpretation until historiography. Research true history is inseparable from the process of heuristic search sources. Search primary sources

such legislation include PP 6, 1960, Keputusan Presiden No. 200 tahun 1960, Penetaan Presiden NO.7 1960 and the source of contemporary print media coverage from newspapers Bintang Timoer, Abadi, Pikiran Rakjat, Nasional and Sket Masa in 1959-1966. Secondary sources such as books of reference relating to the dissolution of political parties Masyumi and PSI the ages of demokrasi terpimpin.

Based sources in this study can obtain the following results. 1) The political situation in a stalemate due to a multiparty system leading to frequent fall of the cabinet, there is a difference of ideology between the president's pro PKI with Masyumi and PSI, there is economic disparity between the center and regions that caused the event PRRI 2) The power of the president of the greater since Dekrit Presiden 5 Juli 1960 as the start of guided democracy, the president dissolved the party Masyumi and PSI did not agree with konsep guided democracy, and some of its leaders are involved in the PRRI. 3) The political impact arising from the dissolution of the party is the deviation constitution which made the current president to dissolve Masyumi and PSI and the strengthening of the role of PKI in government, the economic impact of Indonesia experienced a deficit budget because of spending to quell members PRRI together with Indonesia out of the UN, so that Indonesia did not get help investors and the IMF and finally led Masyumi and PSI involved PRRI arrested and leaders who are not involved are also imprisoned.

Keywords: Demokrasi Terpimpin, dissolution of the Party, Partai Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI)

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam partai politik merupakan salah satu hak asasi manusia. Walaupun hak asasi manusia diakui sebagai hak yang melekat pada setiap orang karena kemanusiaannya, namun terdapat pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak tersebut. Pembatasan itu diperlukan dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, demi keamanan nasional dan keselamatan publik, untuk mencegah kejahatan, untuk melindungi kesehatan dan moral, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain.¹ Kebebasan hak politik di Indonesia mulai dibatasi setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi awal mulan diberlakukan demokrasi terpimpin di Indonesia. Presiden Soekarno memandang banyaknya partai politik sebagai salah satu ketidak stabilan negara. Banyaknya partai politik bahkan dipandang lebih membahayakan dari pada sikap kedaerahan. Terbukti dengan gagalnya konstituante dalam menyusun konstitusi. Sehingga perlu diadakan penyederhanaan partai politik berdasarkan generalisasi latar belakang partai. Penyederhanaan partai politik juga dianggap penting oleh Soekarno karena sistem multipartai merupakan model demokrasi barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Soekarno akhirnya mengeluarkan Undang - Undang tentang Pembubaran partai politik, pelarangan dan pembatasan partai politik.²

Pada awalnya Masyumi, PNI, dan PSI merupakan pilar pemerintahan. Ketiga partai tersebut secara bergantian memegang tampuk kepemimpinan dan selalu menempatkan tokoh-tokohnya ke dalam kabinet. Posisi masyumi dan PSI mulai bergeser pada

saat PKI mulai bangkit dan mempengaruhi pandangan Presiden Soekarno yang hendak menyatukan seluruh kekuatan negara dari unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pertentangan antara Presiden Soekarno dengan Masyumi dan PSI semakin terbuka saat kedua partai tersebut menolak konsepsi presiden tentang demokrasi terpimpin. Beberapa pemimpin Masyumi dan PSI terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Masyumi yang merupakan partai dengan ideologi Agama Islam sangat menentang kebijakan pemerintah yang mengizinkan pendirian Partai Komunis Indonesia yang jelas – jelas bertentangan dengan Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke-4 dan Batang Tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi *Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa*.³ Begitupula PSI yang memiliki ideologi sosialis sangat bertentangan dengan komunis.

Sebelum Keppres No 200/1960 dan 201/1960 diterapkan pihak eksekutif meminta pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung (MA) yang pada waktu itu diketuai oleh Mr. Wirjono Pradjodikoro. Permintaan pertimbangan ini belum secara konstitusional diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau hanya berdasarkan legitimasi bagi Presiden Soekarno untuk membubarkan partai Masyumi dan PSI. Mahkamah Agung yang saat itu sudah berdiri belum bisa melaksanakan fungsinya secara independen. Presiden menjelaskan bahwa fungsi Mahkamah Agung hanya mendengarkan eksepsi Presiden dan tidak berhak memberikan keputusan apapun.⁴ Secara resmi Presiden akhirnya mengeluarkan Keppres No 200/1960 dan Keppres 201/1960 pada tanggal 17 Agustus tahun 1960. Pimpinan Masjumi dan PSI dengan terpaksa akhirnya membubarkan partai

¹ M. Ali Syafa'at. *Pembubaran partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2011. Hlm 37

² M Ali Syafa'at, Op Cit. hlm 141

³ Fatkhurohman. *Pembubaran Partai Politik di Indonesia: Tinjauan Historis Normatif Pembubaran Parpol*. Malang: Setara Press. 1990. Hlm 99

⁴ Harian Abadi. No 141 tahun X. Tanggal 16 agustus 1960. Hlm 1

mereka tanggal 31 Agustus 1960 sesuai dengan perintah Presiden.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada aspek sejarah adanya pembubaran Partai Masyumi dan PSI pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 – 1966. Pada tahun 1959 menjadi awal mula diberlakukannya demokrasi terpimpin dengan dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1960 dan berakhir pada tahun 1960 saat Presiden Soekarno mengundurkan diri dari pemerintahannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penelitian ini merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana situasi politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin; (2) Mengapa setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden terjadi pembubaran Partai Masyumi dan PSI; (3) Apa dampak pembubaran partai politik bagi kehidupan Bangsa Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah dilakukan berdasarkan empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Metode ini diawali dengan mengumpulkan sumber atau dalam sejarah disebut dengan heuristik. Pengumpulan sumber dalam penelitian ini yakni mengumpulkan sumber-sumber primer berupa Keputusan Presiden No 200 tahun 1960 tentang pembubaran Partai Masyumi, Penetapan Presiden No 7 tahun 1959 tentang Syarat – Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian, Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No 6 Tahun 1960, Peraturan Presiden No 25 tahun 1960 tentang perubahan PP No 13 dan sumber yang berasal dari pemberitaan media cetak dari surat-surat kabar dan majalah nasional yang sejaman seperti *Harian Fikiran Rakjat*, *Harian Sosialis*, *Harian Abadi*, *Koran Bintang Timur*, *Koran Nasional*, *Majalah Sket Massa*. Langkah kedua dari metode sejarah ialah melakukan kritik Sumber. Kritik sumber yakni kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Peneliti melakukan kritik intern dengan meneliti keabsahan sumber yang diperoleh, mengkritisi isi sumber atau data, diteliti, dibandingkan, diolah hingga ditemukan sebuah fakta. Proses kritik intern dilakukan dengan membandingkan kecocokan dan kesesuaian antara pemberitaan yang diinformasikan oleh koran maupun majalah yang didapat dengan sumber sekunder yang sesuai dengan tema guna mendapatkan hasil berupa fakta yang valid. Sumber pendukung baik dari sumber penulis asing maupun

penulis lokal dapat saling melengkapi dalam penulisan sejarah tersebut.

Langkah ketiga yakni interpretasi atau penafsiran. Penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan dari sumber-sumber yang telah melewati tahap kritik sumber. Peneliti pada tahap interpretasi berusaha membentuk fakta-fakta yang kredibel, menjadi suatu kesatuan yang logis.

Pada tahap ini makna ditentukan dari hubungan fakta-fakta sehingga terbentuk rangkaian kisah maupun peristiwa. Tahap ini dilakukan agar penulis dapat memperoleh penafsiran tentang hubungan antar fakta yang terkandung di dalam berbagai sumber tersebut kemudian dapat mencapai suatu hipotesa tentang pembubaran partai politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.

Langkah terakhir dalam penelitian ini ialah Historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan proses merekonstruksi fakta-fakta masa lampau, sehingga terbentuklah tulisan sejarah yang runtut, kronologis dan sesuai berdasarkan penulisan sejarah yang benar. Dalam tahap terakhir ini, peneliti menyusun sebuah penelitian sejarah mengenai Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Situasi Politik Demokrasi Terpimpin

1. Latar Belakang Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin terdiri dari kata demokrasi dan terpimpin. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani "*demos*" yang berarti rakyat dan "*kratos/kratein*" yang berarti kekuasaan/berkuasa. Jadi demokrasi berarti rakyat berkuasa atau *government or rule by the people*.⁵ Pengertian terpimpin dalam Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Menurut Soekarno Demokrasi Terpimpin adalah suatu demokrasi di dalam segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan, yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi dan sosial di samping itu juga sebagai alat untuk mencapai tujuan revolusi, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur penuh dengan kebahagiaan materiil dan spiritual.⁶

Latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin adalah hasil evaluasi dan koreksi atas dijalankannya model demokrasi liberal yang dalam prakteknya menimbulkan instabilitas nasional. Terbukti pada saat itu tercatat telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet dalam kurun waktu 11 tahun (1945-1956), dan terjadi beberapa pemberontakan di beberapa daerah. Hal ini disebabkan oleh sifat demokrasi parlementer yang memberikan ruang dominannya peran partai-partai politik dalam mengatur jalannya roda pemerintahan, karena fragmentasi partai-partai politik setiap kabinet

⁵ Miriam Budiarmo. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Cetakan Keduapuluh Lima. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm : 105

⁶ Tujuh Bahan Indoktrinasi RI. Tahun 1960. Hlm : 60

berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil. Namun kenyataannya koalisi yang dibangun sering kurang mantap dan partai-partai politik dalam koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Dengan demikian timbul kesan bahwa partai-partai politik dalam koalisi kurang dewasa dalam menghadapi tanggungjawab mengenai permasalahan pemerintahan. Di sisi lain pihak partai-partai politik dalam barisan oposisi tidak mampu untuk berperan sebagai oposisi yang konstruktif yang menyusun program-program alternatif, tetapi hanya menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi.⁷

Persaingan antar partai politik dapat dilihat dari komposisi kabinet pada masa berlakunya UUDS 1950 mulai dari Kabinet Natsir sampai Kabinet Alisastroamidjojo II. Pada masa Kabinet Natsir dan Burhanuddin Harahap dari Masjumi, tidak ada menteri dari PNI. Sebaliknya, pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo dari PNI, tidak terdapat menteri dari Masjumi. Pengecualian hanya terjadi pada masa Kabinet Sukiman (Masjumi) dan Kabinet Wilopo (PNI).⁸

Gagasan Presiden Soekarno untuk mengubah tatanan demokrasi parlementer dikemukakan pada pidato 21 Februari 1957. Pidato tersebut menunjukkan pandangannya bahwa berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah karena pemerintahan yang tidak stabil akibat kurangnya kewibawaan kabinet dan keharusan menghadapi kekuatan oposisi. Demokrasi yang disebut dengan istilah demokrasi liberal parlementer adalah demokrasi barat yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Soekarno mengajukan konsepsi yang terdiri dari dua hal, yaitu tentang kabinet dan Dewan Nasional.⁹

Konsepsi Presiden itu kemudian menimbulkan pro kontra, partai-partai seperti PNI, PKI, Baperki dan Murba menyokongnya dengan serta merta berupa pernyataan-pernyataan tercetak, rapat-rapat umum, pengiriman delegasi dan lain-lain. Sedangkan partai-partai agama, seperti Partai Masyumi, Partai NU, PSII dan Partai Katholik menolaknya karena menganggap bahwa konsepsi itu menyinggung masalah yang fundamental bertalian dengan susunan ketatanegaraan yang seharusnya menjadi wewenang Konstituante.

2. Kekuasaan Presiden Semakin Besar

Tanggal 1 Desember 1956, Moh Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Secara otomatis Presiden Soekarno menjadi pemegang utama

kekuasaan di Indonesia. Pertentangan keduanya adalah mengenai prinsip menangani kekacauan yang ada saat itu, Soekarno beranggapan bahwa dengan adanya upaya pengendalian parlemen nasional maka akan tercipta stabilitas politik dan ekonomi yang mantab, sementara menurut Hatta adalah menata ekonomi dengan bertumpu masyarakat desa. Hatta membela kepentingan perkembangan koperasi dan pemberian otonomi yang luas pada satuan pemerintah setempat untuk melaksanakan pemerintahan.

Pengunduran diri Hatta ini telah menimbulkan keresahan dan serangkaian protes, khususnya dari kalangan luar Jawa dan yang anti komunis. Adanya simpati kepada Hatta telah menimbulkan kecenderungan anti Soekarno dan anti Jakarta. Pecahnya dwitunggal Soekarno – Hatta dengan debat yang cukup lama secara terbuka, juga berpengaruh dalam kepartaian. Masyumi dan PSI condong ke kubu Hatta sedangkan PNI, PKI dll lebih condong ke kubu Soekarno. Disamping itu juga berpengaruh pada perbedaan antara golongan jawa/pusat dengan seberang/daerah, ataupun antara Islam dan Komunis.¹⁰

Tatanan baru politik ini membuka kesempatan untuk tumbuhnya kediktatoran. Sebagian pengamat menegaskan kediktatoran Soekarno sedang dalam proses pembentukannya. Hal tersebut terbukti dengan besarnya pengaruh Soekarno terhadap kabinet. Gagasan demokrasi terpimpin yang disosialisasikan dalam semua diskusi masyarakat menandakan presiden menginginkan adanya partai tunggal. Sebaliknya sebagaimana pengamat beranggapan bahwa sejumlah besar tindakan tentara yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Keadaan Darurat (SOB), menunjukkan bahwa Indonesia mulai menuju kediktatoran militer.¹¹

Tahun 1960 terjadi konflik parlemen dengan Soekarno parlemen menentang keras Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. Jusuf Wibisono, tokoh DPP Partai Masyumi, menjelaskan bahwa pemicu adalah bahwa pemerintah pada waktu itu berpendirian kalau pengeluaran-pengeluaran yang telah disusun dalam RAPBN yaitu penerimaan yang direncanakan sama besarnya dengan pengeluaran yakni sebesar 44 milyar rupiah, dan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan penerimaan akan diambil melalui langkah menaikkan pajak. Sebaliknya fraksi-fraksi dalam parlemen mayoritas berpendapat bahwa pengeluaran-pengeluaran negara harus disesuaikan dengan pembatasannya sekitar 36 sampai 38 milyar rupiah dengan tidak mengadakan pajak-pajak yang terlalu memberatkan.

⁷ Miriam Budiardjo. 1989. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm : 70

⁸ M. Rusli Karim. 1993. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasang-Surut*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Press. Hal : 130

⁹ M Ali Syafaat. 2011. *Pembubaran partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai*

Politik dalam Pergulatan Republik. Jakarta : Rajagrafindo Persada. Hlm : 142

¹⁰ Suswanta. 1992. *Keberanian Untuk Takut*. Yogyakarta : Avyrouz. Hlm : 64

¹¹ Herbeth Feith, *Soekarno-Militer dalam Demokrasi terpimpin*. Hlm 29

Partai Masyumi dan PSI berperan sebagai provokator pemboikotan RAPBN itu. Kedua sikap partai ini lebih menonjolkan sikap subjektivitas permusuhan terhadap Soekarno yaitu dengan menempuh segala langkah melawan apapun yang pemerintah kehendaki.

Pada 5 Maret 1960 Presiden Soekarno mengeluarkan Penpres No.3/1960 tentang pembubaran DPR hasil pemilihan umum 1955. Alasan presiden membubarkan lembaga pemerintahan tersebut atas dasar bahwa DPR hasil pemilihan umum 1955 tidak memenuhi harapan untuk saling membantu pemerintah, tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945, Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu karena susunan DPR yang sekarang ini hasil dari UUDS 1950. Memanfaatkan *superpower* yang dimilikinya, Soekarno merasa tidak ada yang tidak bisa melawan pemerintahannya, termasuk mengambil langkah berani membubarkan parlemen yang pada kenyataannya hanya untuk menyingkirkan Partai Masyumi dari parlemen.¹²

Kekuasaan presiden semakin meluas, tidak hanya di bidang politik melainkan dibidang pers, penerbitan dan impor buku, pendidikan dan beberapa organisasi non-pemerintah. Sebagian organisasi itu dilarang seperti beberapa sekte keagamaan dan aliran keagamaan yang didirikan di daerah pedesaan. Berbagai organisasi veteran dilebur kedalam suatu wadah tunggal yang dikendalikan pemerintah, demikian juga berbagai organisasi kependuan. Hampir semua yang masih tersisa, seperti sepuluh parpol dan massanya, juga perkumpulan pedagang, profesi, keagamaan dan kebudayaan diharuskan membuat pernyataan dukungan kepada pemerintah dan ideologi Negara dan bekerjasama dengan pemerintah dalam proyek-proyek tertentu. Lembaga hukum juga kehilangan otonomnya. Pada bulan februari 1960, ketua Mahkamah Agung diberi kedudukan dalam kabinet. Enam bulan kemudian, Presiden Soekarno mengecam keras Trias Politica, yakni teori tentang pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

3. Partai Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kebijakan penyederhanaan kepartaian dimulai pada 31 Desember 1959 saat Presiden Soekarno mengeluarkan Penpres Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian. lahirnya ketentuan tentang penyederhanaan partai politik adalah karena keyakinan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan keadaan membahayakan negara dan merintangi pembangunan nasional hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden adalah karena sistem kepartaian yang berlaku pada saat itu. Oleh karena itu dinilai harus dilakukan perubahan dengan melakukan penyederhanaan kepartaian. Penpres Nomor 7 Tahun 1959

terdiri atas dua diktum, yaitu; pertama, mencabut Makluma Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai anjuran pemerintah tentang pembentukan partai politik, dan kedua, menetapkan Penetapan Presiden tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian. Hal itu dapat dilihat dari diktum memutuskan di bawah ini.

M e m u t u s k a n :

Pertama: Mentjabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 (Berita Republik Indonesia Tahun I No. 1 halaman 3 kolom 4) mengenai Andjuran Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik.

Kedua: Menetapkan Penetapan Presiden tentang Sjarat-sjarat dan Penjederhanaan Kepartaian.¹³

Pada tanggal 18 Desember 1959 Kabinet setuju rancangan peraturan tentang syarat-syarat penyederhanaan kepartaian, serta pembentukan Front Nasional dengan beberapa perubahan. Partai tidak diperbolehkan tanpa izin dari pemerintah mendapat bantuan dalam bentuk dan dengan cara apapun juga. Yang berhak menjadi anggota partai adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 18 tahun atau lebih. Presiden berwenang mengawasi dan memerintahkan untuk memeriksa tata usaha, keuangan dan kekayaan partai-partai. Presiden sesudah mendengar Mahkamah Agung dapat melarang dan/atau membubarkan partai yang: a.) Bertentangan dengan azas dan tujuan negara; b.) Programnya berusaha merombak azas dan tujuan negara; c.) Sedang melaksanakan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas memberikan bantuan sedangkan partai itu dengan tidak resmi menyalahkan perbuatan anggotanya itu; d.) Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Penetapan Presiden ini. Partai yang dibubarkan berdasarkan ketentuan ini harus dibubarkan dalam waktu selama-lamanya 30 hari 24 jam terhitung mulai tanggal berlakukannya.¹⁴

Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran dapat diakui sebagai partai pada waktu mulai berlakunya Penetapan Presiden ini ialah partai-partai yang telah berdiri pada waktu Dekrit Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Perang dikeluarkan dan memenuhi syarat-syarat tersebut dalam Penetapan Presiden ini. Demikian pokok-pokok ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 yang diundangkan tanggal 31 Desember 1959 Presiden Soekarno menyatakan bahwa partai-partai yang memenuhi syarat mempunyai hak hidup, sebaliknya partai yang tidak memenuhi syarat akan dibubarkan setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang mengenai penyederhanaan kepartaian.

B. Pembubaran Partai Politik

¹² Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. Op., Cit., 1989 Hlm: 405

¹³ Ali Syafa'at. *Pembubaran partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Op.Cit., Hlm : 154

¹⁴ *Ibid*,

1. Syarat Pembubaran Partai Politik

Syarat-syarat partai politik di dalam Penpres dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat kuantitatif dan syarat kualitatif. Syarat kuantitatif adalah mempunyai cabang-cabang yang tersebar paling sedikit seperempat jumlah Daerah Tingkat I dan jumlah cabang-cabang itu harus sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah Daerah Tingkat II seluruh Indonesia. Sedangkan syarat yang bersifat kualitatif meliputi:

1. Menerima dan mempertahankan asas dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945
2. Dalam anggaran dasarnya harus dicantumkan dengan tegas, menerima dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat dasar-dasar negara, yaitu Pancasila, dan bertujuan membangun suatu masyarakat adil dan makmur menurut kepribadian Bangsa Indonesia serta mendasarkan program kerjanya masing-masing atas Manifesto Politik Presiden 17 Agustus 1959 yang telah dinyatakan sebagai haluan negara
3. Dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga harus mencantumkan dengan tegas organisasi-organisasi lain yang mendukung dan atau bernaung di bawah partai;
4. Dalam memperjuangkan tujuannya, partai politik diharuskan menggunakan jalan damai dan demokratis;
5. Partai tidak diperbolehkan mempunyai pengurus maupun anggota seorang warga negara asing; dan
6. Partai tanpa ijin pemerintah tidak boleh menerima bantuan dari pihak asing dan atau memberi bantuan kepada pihak asing dalam bentuk dan cara apapun.¹⁵

Sedangkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pembubaran diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Penpres Nomor 7 Tahun 1959 sebagai berikut:

(1) Presiden, sesudah mendengar Mahkamah Agung dapat melarang dan/atau membubarkan Partai Jang:

1. bertentangan dengan azas dan tujuan Negara;
2. programnya bermaksud merombak azas dan tujuan Negara;
3. sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turutserta dalam pemberontakan-pemberontakan atau telah jelas memberikan bantuan, sedangkan Partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya itu; tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Penetapan Presiden ini.¹⁶

Dengan demikian, suatu partai politik dapat dibubarkan jika asas, program, atau kegiatannya bertentangan dengan asas dan tujuan negara, atau programnya hendak mengubah asas dan tujuan negara tersebut, tanpa ditentukan bahwa program tersebut dijalankan dengan cara damai dan demokratis atau tidak. Alasan selanjutnya adalah sedang melakukan pemberontakan. Hal itu dilihat dari peran pimpinan suatu partai politik dalam suatu pemberontakan dan partai politiknya tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota tersebut.

2. Keterlibatan pemimpin Masyumi dan PSI dalam PRRI

Krisis politik yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1956 dimulai dengan munculnya beberapa dewan dalam tubuh Angkatan Darat mencapai puncaknya pada tahun 1958 dengan adanya peristiwa PRRI-Permesta. Kalangan militer (AD) sangat menyesalkan jatuhnya kabinet Boerhanuddin Harahap sekaligus mengkhawatirkan cara jatuhnya kabinet. Hal ini dikarenakan hubungan antara Angkatan Darat dengan kabinet Burhanuddin telah terjalin hubungan yang baik. Sementara terpilihnya kabinet Ali untuk yang kedua kalinya telah mengecewakan pihak militer.

Kondisi perekonomian yang tidak stabil juga dianggap menjadi salah satu penyebab berdirinya PRRI-Permesta. Kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil berdampak pada terselenggaranya pembangunan dan pemerintahan yang baik. Daerah menuduh pusat hanya mementingkan kepentingannya sendiri, terlalu birokratis dan sentralistis. Pusat hanya menyedot dana dari daerah tapi tidak dipergunakan untuk membangun daerah. Sehingga di daerah muncul beberapa dewan diantaranya Dewan Gajah di Sumatra Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

Beberapa tokoh Masyumi yang terlibat dalam PRRI adalah Syafruddin Prawiranegara, Boerhanuddin Harahap dan Moh Natsir. Sumitro Djojohadikusumo adalah salah seorang tokoh utama Partai Sosialis Indonesia, ia sudah lebih dahulu meninggalkan Jakarta. Selain Sumitro tokoh PSI yang bergabung dengan PRRI adalah seorang Duta Besar RI untuk Roma yang bernama Mr. St. Mohd Rasyid. Dia menegaskan bahwa dia bergabung bukan sebagai seorang PSI melainkan karena dia adalah orang Minangkabau. Tokoh PSI lainnya yang juga bergabung adalah murid Sjahrir bernama Des Alwi. Dia berperan sebagai juru bicara PRRI di luar negeri, terutama di Singapura, Manila, dan Hongkong.¹⁷

Sebuah pertemuan di Gubernur Sumatra pada tanggal 6 Januari 1958 dihadiri oleh beberapa perwira menengah diantaranya Ahmad Husein, Dahlan Djambek, M Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Ventje

¹⁵ Moch. Ali Syafa'at. *Pembubaran partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik. Op., Cit.* Hlm 155-156

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ Rusdi. 1965. *PSI dan Peran Politikanya di Indonesia Tahun 1948 - 1960*. Skripsi hal 216

Sumual. Sedangkan dari kalangan sipil dihadiri oleh Moh Natsir, Boerhanuddin Harahap, Sjafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikusumo dan Isa Anshari. Semua yang hadir sepakat bahwa tindakan Presiden Soekarno yang menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur dan selanjutnya membentuk kabinet karya adalah inskontitusional. Menurut UUDS yang menjadi landasan bernegara presiden tidak memiliki wewenang eksekutif. Mereka yang hadir juga mempertimbangkan bahwa jika Kabinet Juanda mundur maka orang yang pantas menjadi formatur adalah Mohammad Hatta dan Hamengkubuwono IX. Keduanya berasal dari Jawa dan luar Jawa sehingga dipandang sebagai pasangan yang ideal.

Tanggal 7 dan 8 September Letnan Kolonel Ahmad Husein dari Sumatera Barat, Letnan Kolonel Ventje Sumual dari Sulawesi Utara, dengan Letnan Kolonel Barlian sebagai tuan rumah mengadakan pertemuan. Hasil pertemuan ketiga perwira itu melahirkan pernyataan politik yang disebut Piagam Palembang, isinya antara lain: 1) Kembalinya Hatta pada kepemimpinan nasional, 2) Membersihkan pimpinan Angkatan Bersenjata dari simpatisan komunis, dan Mayor Jenderal AH Nasution harus segera diganti, 3) Desentralisasi bentuk dan susunan pemerintahan, memberikan otonomi yang lebih luas pada daerah-daerah, 4) Pembentukan Senat untuk membela kepentingan daerah dalam pemerintahan, 5) Melarang ideologi komunisme sebab bertentangan dengan Pancasila.¹⁸

Tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Husein dan kawan-kawan memproklamkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang. Sebelumnya mereka telah mengadakan persiapan pada tanggal 11 Februari, salah satu persiapan tersebut adalah disusunya Kabinet PRRI yang diumumkan pada saat proklamasi. PRRI mendapatkan sambutan hangat dari berbagai daerah, yakni dari Sumatra Utara dan Sulawesi Utara. Dua hari setelah proklamasi PRRI, Permesta di Sulawesi menyatakan bergabung dengan PRRI. Mengetahui hal ini sepulang dari luar negeri Presiden Soekarno mengehendaki tindakan tegas terhadap keduanya. AURI menyerang instansi PRRI di Bukittinggi, Padang dan Manado pada akhir Februari. Pasukan TNI dibawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani tiba di Padang untuk melancarkan serangan pada awal Maret 1958. Tanggal 5 Mei Bukittinggi dan Padang sudah berhasil diduduki oleh pemerintah dan pasukan PRRI tinggal melakukan gerilya dan semakin terdesak. Seluruh anggota PRRI akhirnya bisa diamankan oleh pemerintah.

3. Pembubaran Partai Masyumi dan PSI

Tindakan Soekarno yang tidak melibatkan sama sekali wakil-wakil Partai Masyumi dalam badan-badan negara hasil bentukan rezim Demokrasi Terpimpin, tidak kemudian menyurutkan sikap Partai

Masyumi untuk tetap vokal mengkritik atau berposisi terhadap kepemimpinan Soekarno. Politik ideologi Nasakom yang sejak permulaan Demokrasi Terpimpin gencar dikampanyekan Soekarno, tidak luput dari serangan kritik dan penolakan dari Partai Masyumi. Partai Masyumi bersikukuh tidak mau menerima Nasakom, alasannya karena Nasakom tidak lain adalah cara-cara Soekarno untuk memaksakan masuknya komunisasi ke segala lapisan negara dan kehidupan bangsa.

Sikap keras Partai Masyumi terhadap rezim Demokrasi Terpimpin membuat Soekarno pada akhirnya berada pada suatu kesimpulan, bahwa langkah-langkah untuk menyingkirkan Partai Masyumi dari peta perpolitikan Indonesia harus segera disusun. Soekarno merasa perlu menggunakan cara-cara yang "legal konstitusi" dan sedikit campuran pembenaran dari "logika revolusi" untuk menyingkirkan partai tersebut, sebab biar bagaimanapun Partai Masyumi adalah partai Islam terbesar yang memiliki potensi kesensitifan apabila membubarkan partai tersebut dengan cara-cara yang tanpa memiliki payung konstitusi di atasnya.

Presiden Soekarno membentuk suatu logika revolusi yang dipergunakannya untuk menyerang eksistensi Partai Masyumi, yaitu dengan membenturkan penolakan Partai Masyumi pada ide Nasakom. Soekarno menyatakan: "Siapa yang setuju kepada Pancasila, harus setuju kepada Nasakom; siapa yang tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila! Sekarang saya tambah: Siapa setuju kepada UUD 1945 harus setuju kepada Nasakom, siapa tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada UUD 1945"¹⁹

Partai Masyumi menyatakan sikap menolak terhadap ide Nasakom, dengan begitu secara tidak langsung Partai Masyumi masuk dalam kriteria yang ditetapkan pada Bab IX Pasal 9 dari Penpres No.7/1959 yaitu sikap yang bertentangan dengan azas dan tujuan negara.

Sementara kaitannya dengan sikap Soekarno terhadap Partai Masyumi dan pembentukan DPR GR, ada upaya Soekarno untuk memecah belah pemimpin-pemimpin Partai Masyumi. Sukiman Wirdjosandjojo dan Jusuf Wibisono, sewaktu keanggotaan DPR GR diumumkan pada 1 April 1960, mereka adalah tokoh Partai Masyumi yang ikut dicantumkan. Sukiman Wirdjosandjojo dan Jusuf Wibisono adalah tokoh-tokoh yang anti PKI seperti tokoh-tokoh Partai Masyumi lainnya, tetapi keduanya tidak menunjukkan anti Soekarno sebagaimana kelompok Natsir-Sjafruddin-Prawoto.

Sukiman Wirdjosandjojo menjabat Wakil Ketua I Partai Masyumi, diangkat Soekarno sebagai anggota DPR GR tanpa diajak berunding terlebih dahulu dan dikatakan mewakili kaum cendekiawan. Namun sekali pun secara *personal* agak dekat dengan

¹⁸ Suswanta. *Keberanian Untu Takut. Op., Cit.* Hlm 121

¹⁹ Zaini Muslim A. *Sikap Politik Soekarno terhadap Masyumi Tahun 1957 – 1960.* Skripsi Hlm 77

Soekarno, Sukiman Wirdjosandjojo ternyata menolak pengangkatannya. Alasan Sukiman menolak pengangkatan dirinya sebagai anggota DPR GR adalah demi mempertahankan integritas pribadi sebagai pemimpin umat. Ungkapannya tentang “ketidakperwiraan dan kerendahan budi” yang bakal melekat pada dirinya seandainya menerima pengangkatan, sementara partainya dikucilkan. Sukiman Wirdjosandjojo ternyata tetap memegang teguh etika politiknya Bertolak belakang dengan Jusuf Wibisono yang menerima pengangkatannya sebagai anggota DPR GR mewakili kaum buruh. Bagi Jusuf Wibisono komposisi DPR GR tidak berbahaya pada Islam. Tampaknya beban psikologis Jusuf Wibisono jauh lebih ringan ketimbang Sukiman Wirdjosandjojo, karena ia belum pernah menjabat sebagai Ketua Umum sebagaimana Sukiman sebelum digantikan Natsir.²⁰

Pertentangan antara Presiden Soekarno dengan Partai Masyumi dan PSI semakin meruncing dengan adanya keterlibatan beberapa pemimpin partai tersebut dalam PRRI. Setelah PRRI berhasil ditumpas Presiden bergegas mengambil tindakan untuk melarang Masyumi dan PSI melakukan tindakan politik. Pada 21 Juli 1960 Presiden Soekarno mengundang tokoh-tokoh dari Partai Masyumi ke Istana Bogor, dan seminggu berikutnya pertemuan dilanjutkan kembali di Istana Merdeka yakni untuk memenuhi undangan presiden yang meminta jawaban tertulis atas berbagai pertanyaan yang diajukan presiden kepada Partai Masyumi sehubungan dengan dikeluarkannya Penpres No 7/1959 yang diundangkan akhir tahun 1959. Selain Partai Masyumi diundang juga tiga tokoh PSI juga mengemban topik permasalahan yang sama. Delegasi dari Partai Masyumi diwakili oleh Ketua Umum Prawoto Mangkusasmito dan Sekretaris Umum Yunan Nasution.²¹

Partai Masyumi secara tegas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah, Partai Masyumi menolak segala tuntutan yang dituduhkan pemerintah bahwa Partai Masyumi mensponsori PRRI dengan berdasar pada keterlibatan Ketua Umum Partai Masyumi Natsir yang terlibat di dalamnya. Kedua tokoh ini menegaskan bahwa yang memimpin Partai Masyumi sekarang ini bukan lagi Natsir tapi Prawoto Mangkusasmito, dan yang ikut ke PRRI bukan mengatasnamakan partai melainkan atas nama pribadi.

Kepala seksi sekretariat staf Peperti Letkol Mr. Sutjipto menerangkan bahwa Presiden Soekarno akan mengajukan persoalan Partai Masyumi dan PSI kepada Mahkamah Agung RI pada hari Minggu 31 Djuli 1960. Keterangan ini disampaikan oleh Letkol Mr. Sutjipto sabtu siang setelah selesai sidang ke 6 musyawarah badan pembantu peperti yang berlangsung di Istana Bogor. Sidang ke 6 tersebut dihadiri oleh pejabat MP Leimena mewakili deputi 1 peperti, MP Djuanda deputi 2 MKN Jendral Nasution, para anggota badan pembantu

peperti, asisten dan kepala staf peperti, dan Ketua Mahkamah Agung RI. Tapi mengenai kehadiran ketua Mahkamah Agung pada waktu sebelum sidang dimulai Presiden telah memanggil wartawan dan mengatakan bahwa “Saya telah minta Ketua Mahkamah Agung hadir dalam sidang ini, untuk mendengarkan pembicaraan para anggota sidang, tapi Mahkamah Agung dalam sidang ini tidak akan ikut mengeluarkan pendapat apapun. Ketua Mahkamah Agung hanya akan mendengarkan saja.”²²

Dalam amanat ulang tahun ke-15 Proklamasi Kemerdekaan, Presiden Soekarno memberitahukan kepada rakyat bahwa sebagai Presiden RI sesudah mendengar pendapat Mahkamah Agung, memerintahkan bubarnya Masyumi dan PSI. Jika satu bulan sesudah perintah ini diberikan Masyumi dan PSI belum dibubarkan, maka Masyumi dan PSI dinyatakan sebagai partai terlarang. Menurut Presiden, pembubaran partai Masyumi dan PSI adalah berdasarkan masalah Penpres No.7/1959 dan Perpres No.13/1960 yang sudah berjalan.

Keputusan pembubaran Partai Masyumi dan PSI diumumkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi dalam pidato 17 Agustus 1960 di Istana Merdeka. Dan ditindaklanjuti dengan Kepres No. 200 tahun 1960 tentang pembubaran Partai Politik Masyumi dan Kepres No. 201 tahun 1960 tentang pembubaran Partai Politik Sosialis Indonesia (PSI). Pertimbangan membubarkan kedua partai tersebut untuk kepentingan keselamatan negara dan bangsa karena telah melakukan pemberontakan, pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan yang disebut dengan “Pemerintah Revolusioner Indonesia” atau “Republik Persatuan Indonesia” atau telah jelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan sedangkan kedua partai tersebut, tidak resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggota pimpinannya.

Dari dua Keputusan Presiden tersebut secara langsung negara menekan Partai Masyumi untuk segera membubarkan diri jika tidak ingin dinyatakan sebagai partai terlarang. Namun di pihak lain Partai Masyumi besikeras tetap ingin melawan dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Mohammad Roem diberikan kuasa oleh Prawoto Mangkusasmito untuk menggugat perintah pembubaran itu. Gugatan diajukan melalui Ketua Pengadilan Istimewa Negeri Jakarta tertanggal 8 September 1960.

Isi surat gugatan Mohammad Roem yang dilayangkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta (Busyairi, 1985 : 263) yakni meminta untuk memeriksa dan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Penpres No.7/1959 dan Penpres No.13/1960 tidak mempunyai kekuatan hukum.

²⁰ Ma`arif. *Islam Dan Politik : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*. Op., Cit Hal : 64- 66

²² Harian Abadi. No 140. Tahun ke – X. Senin 1 Agustus 1960

2. Membatalkan setidaknya menyatakan batal karena hukum Kepres No.200/1960.
3. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara.²³

Namun setelah hampir sebulan lebih surat gugatan itu dilayangkan tidak ada jawaban sama sekali dari pihak pengadilan. Baru pada 11 Oktober 1960, Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Moh. Rochjani Soe'oad menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Jawaban tersebut sudah terlambat atau didahului oleh sikap Partai Masyumi yang jauh sebelumnya telah menyatakan bubar.

C. Dampak Pembubaran Partai

1. Dampak Politik

Semakin meluasnya peran PKI dalam penentuan keputusan Presiden Soekarno di segala lapisan masyarakat dan pemerintahan. Hal itu semua tidak lepas dari peran Soekarno yang memberikan kemudahan-kemudahan pada PKI untuk mengekspresikan segala aktivitas politiknya, di saat partai-partai politik lainnya tengah mengalami masa "pengkebirian", sehingga kesan bahwa masa Demokrasi Terpimpin PKI di anak emaskan oleh Soekarno sangat tinggi.²⁴

Ada analisis lain mengenai kedekatan Soekarno dengan PKI yang menyatakan bahwa Soekarno bukanlah seorang komunis, tetapi yang lebih tepat adalah bahwa ia bergantung pada PKI di dalam usaha mempertahankan posisinya menghadapi militer yang muncul sebagai kekuatan politik yang setara. Ada tiga faktor yang berperan mengapa Soekarno menggandeng PKI, pertama, berdasarkan hasil pemilu 1955 PKI merupakan partai terbesar yang mendapatkan kursi-kursi di daerah-daerah Jawa, kedua, PKI mempunyai kelengkapan keorganisasian yang paling luas dan cermat di kalangan penduduk pedesaan dan kelas bawah perkotaan, ketiga, PKI paling mampu mengerahkan massanya ke rapat-rapat umum tempat Soekarno berbicara.²⁵

Tindakan ini diikuti oleh PKI yang bertujuan merongrong kewibawaan negara dan masyarakat. Organisasi-organisasi PKI seperti CGMI, Lekra, Pemuda Rakyat, BTI semakin radikal dan agresif dalam melakukan teror terhadap AD dan organisasi Islam yang selalu dianggap sebagai lawan politiknya yang utama. Wujud dari tindakan ini diterapkan dengan kasus Jengkol, Kanigoro, dan Bandar Betsi, dengan umat

Islam sebagai sasaran utamanya. Dengan maksud menegakkan Undang-Undang Land Reform, PKI membagi-bagikan tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah, yang kebanyakan diambil dari perkebunan pemerintah yang dikelola militer.

Satu sasaran yang tidak kalah pentingnya adalah HMI yang dicap sebagai organisasi kedok Masyumi yang telah dilarang. Tuntutan balik terhadap tindakan sepihak dari PKI dan kondisi perekonomian negara pernah dilontarkan oleh perorangan maupun massa, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Harian Merdeka, Berita Indonesia merupakan pers yang sangat dekat dalam menyuarakan hati nurani rakyat, tetapi sebagai balasannya PKI memunculkan isu gagasan Soekarno seperti Nasakom yang harus ditegakkan, sehingga kandaslah tuntutan yang datang dari rakyat.

2. Dampak Ekonomi

Dalam iklim Demokrasi Terpimpin tampak pemerintah lebih menitikberatkan pembangunan yang berfungsi untuk memperkuat kekuasaan dan mencari *prestise* di luar negeri, sehingga pembangunan ekonomi mengalami kemunduran. Hal ini, terlihat setelah perlawanan di berbagai daerah dapat diselesaikan, pemerintah bukan memecahkan masalah-masalah ekonomi, tetapi membuat isu yang populer tentang pembebasan Irian Barat. Soekarno berusaha memanipulasi massa yang berguna untuk memperkuat kedudukannya. Dengan kampanye ini, militer meminta alokasi dana yang cukup guna memodernisasi persenjataannya serta dana bagi militer.²⁶

Usaha untuk membangun ekonomi menemui jalan buntu karena kalah menarik dengan isu "Ganyang Malaysia". Dengan adanya penentangan terhadap Federasi Malaysia, jelas akan menghambat pembangunan ekonomi, karena donatur untuk membangun berasal dari negara-negara Barat, antara lain: Inggris, Amerika.

Pengabaian masalah ekonomi Indonesia nyaris ambruk. Pertama, operasi - operasi militer melawan pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi selama krisis 1957-1958 memaksa pemerintah mengambil jalan menempuh anggaran defisit yang sangat besar. Masalah defisit diperburuk oleh adanya pembangunan militer untuk mendukung kampanye Irian Barat dan Ganyang Malaysia, sehingga pada tahun 1965 defisit meningkat menjadi 174%.²⁷

Stagnasi ekonomi diperparah dengan sulitnya bantuan ekonomi internasional. Hal ini karena, Indonesia keluar dari PBB, sehingga IMF yang merupakan badan pembantu pembangunan di negara-negara berkembang sulit memberi bantuan kepada Indonesia. Kesulitan keuangan menyebabkan pembangunan berjalan dengan tidak normal,

²³ Zaini Muslim Ahmad. Skripsi. Sikap Politik Soekarno terhadap Masyumi 1957-1960. Hal 93

²⁴ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. 1989. Op., Cit Hlm 71

²⁵ Zaini Muslim Ahmad. Sikap Politik Soekarno terhadap Partai Masyumi tahun 1957 – 1960. Skripsi. Hlm 65

²⁶ Moh. Ali Syafaat. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan & Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. Op., Cit Hal 160

²⁷ Harian Suara Merdeka, Edisi 17 Desember 1961

harga barang-barang pokok sukar dikendalikan, kondisi perekonomian rakyat jauh dari standar.²⁸

3. Penangkapan Tokoh Masyumi dan PSI

Demokrasi terpimpin merupakan gagasan dan konsepsi Presiden Soekarno yang sebenarnya tidak didukung oleh seluruh rakyat. Beberapa anggota Masyumi dan PSI yang telah dibubarkan pada Juli 1960 juga tidak bisa menerima konsepsi presiden tersebut. Masyumi dan PSI menghendaki dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis bukan yang berpusat pada satu pimpinan utama. Sikap tidak setuju pada konsepsi presiden bukanlah tindakan yang melanggar hukum, akan tetapi Presiden Soekarno tidak bisa menerima hal itu. Sebagai akibatnya mereka yang tidak setuju dengan konsepsi demokrasi terpimpin ditangkap dan diasingkan.

Pada tanggal 18 Agustus 1961 akan dilakukan upacara kremasi mantan raja di Gianyar Bali, Anak Agung Gede Agung selaku putra raja mengundang sejumlah kerabat dan handai tolan untuk mengikuti upacara kremasi ayahnya. Anak Agung Gede Agung merupakan tokoh politik Indonesia yang penting paca kemerdekaan Indonesia. Sejak tahun 1950 Gede Agung Anak Agung menjadi anggota PSI dan Bali menjadi daerah dengan basis masa PSI terbesar di Indonesia. Upacara kremasi ayah Anak Agung merupakan tempat bertemunya banyak tokoh besar, baik itu para pimpinan partai politik, pemuka agama serta pejabat dari Jakarta yang diundang ke Bali. Diantaranya yang hadir adalah Sutan Sjahrir, Moh Hatta, M. Roem, R Suprpto (bekas jaksa agung), Subadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Sultan Hamid, dan puluhan ribu tamu undangan lainnya.²⁹

Tidak seorangpun, kecuali mereka yang terlibat mengetahui apa yang terjadi di Gianyar, di samping upacara kremasi dan shilaturrehmi ada laporan dari Soebandrio selaku Kepala Badan Intelijen adanya konspirasi. Soebandrio yang menjadi orang penting dan dekat dengan Presiden Soekarno menerima laporan adanya konspirasi dan dibicarakan tindakan subversive terhdap Negara.

Presiden Soekarno semakin berapi – api menyerukan revolusi Indonesia yang belum berakhir. Pada akhir tahun 1961 Presiden memerintahkan untuk mobilisasi membebaskan Irian Barat. Pada Januari 1962 ketika Soekarno dalam perjalanan pidato ke Makassar terjadi insiden pelemparan granat dalam iring-iringan Presiden. Granat itu menewaskan tiga orang, seorang anak dan dua orang dewasa dan 25 orang mengalami luka. Seminggu kemudian tanggal 15 Januari 1962 dua warga Belanda ditangkap dan berhembus desas desus kea rah pertemuan di Bali. Soekarno memerintahkan penyelidikan lebih lanjut dan diketahuilah ada organisasi dengan nama Verenigde

Ondergondes Corps (VOC) yang diduga bertujuan menggulingkan pemerintahan Soekarno. Ini adalah salah satu scenario yang dibuat lek PKI, dan disebarkan oleh badan intelijen atau BPI Soebandrio.³⁰

Pada tanggal 16 Januari 1962 pukul empat pagi para pemimpin PSI ditangkap, pemimpin PSI yang ditangkap adalah Sjahrir, Soebadio Sastrosatomo, dan Anak Agung Gede Agung. Pada jam yang sama pemimpin Masyumi juga ditangkap antara lain Prawoto Mangkusasmito, Yunan Nasution, Kyai Ansjar, dan Moh Roem.

Tuduhan yang disangkakan pada para tahanan adalah karena terlibat rapat rahasia di Bali yang membicarakan tindakan subversive terhadap Negara. Tuduhan lain adalah adanya tindakan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Makassar atau yang tekenal dengan peristiwa cendrawasih. Mereka dikatakan terlibat dalam gerakan bawah tanah yang mengatasnamakan VOC dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno.

Setelah dilakukan tiga bulan penelitian ternyata tidak ditemukan bukti keterlibatan para tokoh itu seperti tuduhan yang diarahkan kepada mereka. Presiden kemudian mengubah status para tahanan dari tahanan criminal menjadi tahanan politik dengan tuduhan baru yakni melakukan tindakan menghalangi terlaksanya revolusi Indonesia. Penahanan dilanjutkan dengan surat dari Peperti (Penguasa Perang Tertinggi), yang dipimpin oleh Jendral A.H. Nasution sebagai staf. Di lanjutkan dengan pengasingan para tahanan di suatu tempat yang ditentukan oleh pemerintah, tempat pengasingan itu adalah penjara Madiun. Keputusan Peperti itu tidak menyebutkan waktu penahanan. Ini berarti, mereka dapat di tahan untuk jangka waktu yang terbatas. dengan demikian suatu hal yang dapat ditarik adalah bahwa tuduhan-tuduhan tersebut adalah merupakan fitnahan belaka dengan maksud menjebloskan para pemimpin PSI dan Masjumi ke dalam tahanan serta pengasingan.

Tuduhan yang dilontarkan PKI terhadap PSI baik mengenai keterlibatan PSI dalam pengadaan “rapat rahasia” dalam usaha percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Ujung Pandang, memang sulit untuk dibuktikan. Hamid Algadri, seperti dikatakannya, ketika ia menghadiri upacara kremasi mayar ayah Anak Agung, selama di sana kebanyakan ia bersama Sjahrir. Dalam suatu wawancara di tahun 1987, dia juga dengan tegas menolak isyarat sebuah komplotan. Bahkan tidak banyak pembicaraan politik terjadi, kecuali bincang-bincang oleh keluhan yang lazim, ketika bagaimanapun juga, semua “orang berkomplot” selalu bersama-sama dan saling berdekatan dan saling bertemu di Jakarta.³¹

²⁸ Ali Syafaat. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan & Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. Op., Cit Hal 166

²⁹ Rusdi. *PSI dan Peran Kepoliticannya di Indonesia*. Skripsi. Op., Cit. Hlm 235

³⁰ *Ibid*,

³¹ Rusdi. *PSI dan Peran Politikanya di Indonesia tahun 1948 - 1960*. Op., Cit. Skripsi Hal 242

Menurut Hamid Algadri mengenai rapat gelap di bali itu hanya tuduhan saja, bahwa upacara kremasi ayah Anak Agung itu hanya pura – pura itu tidak benar. Kalau memang ada komplotan dari Masyumi dan PSI yang ingin menggulingkan pemerintahan Soekarno saya harusnya Algadri tau karena dia satu kamar dengan Sjahrir. Jadi yang memberikan laporan itu kepada Soekarno adalah PKI dan intelijennya.

Surat penangkapan untuk Sjahrir dikeluarkan oleh Peperti yang dipimpin oleh Soekarno, namun dokumen ditanda tangani oleh Soebandrio sebagai menteri luar negeri dan Nasution sebagai Menteri pertahanan. Nasution dalam memoarnya mengatakan : “Sebenarnya Soekarno yang berada di belakang perintah penangkapan yang diberikan kepada dirinya dengan nama – nama yang belum di isi dalam dokumen, dan memerintahkan Nasution untuk menandatangani kertas seperti adanya”³²

Nasib buruk menimpa Sjahrir, dalam pengasingan dia menderita penyakit darah tinggi di Madiun pada tahun 1963. Dia dipindahkan ke rumah tahanan militer di jakra karena obat – obatan dan penanganan di Madiun masih terbatas. Di sana Sjahrir terkena Stroke dan dalam keadaan sudah tidak bisa bicara dia di ijinan berobat ke Swiss pada tanggal 9 April akhirnya Sutan Sjahrir meninggal di Swiss.³³

Sementara itu para pemimpin PSI lainnya seperti Soebadio Sastrosatomo, Anak Agung Gede Agung beserta para pemimpin Masyumi di asingkan di Madiun. Pada bulan Oktober 1965 di saat terjadi peristiwa pemberontakan G30S mereka dipindahkan ke tahanan militer Jakarta. Pada tanggal 16 Mei 1966 baru para pemimpin itu dibebaskan.

PENUTUP KESIMPULAN

Demokrasi terpimpin merupakan suatu tatanan baru dalam kancah politik di Indonesia yang diawali dengan keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1959. Semua keputusan serta pemikiran berpusat pada kepala negara, bentuk ini dikenal juga dengan sebutan semi otoriter atau demokrasi tunggal. Penyederhanaan partai politik merupakan salah satu agenda Soekarno selaku kepala Negara dalam menjalankan demokrasi terpimpin. Penyederhanaan partai politik dilakukan karena sistem multipartai merupakan model demokrasi barat yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Sistem multipartai telah merugikan rakyat Indonesia karena dengan adanya banyak partai dalam parlemen membuat oposisi menjadi sangat terbuka dan antar partai saling menjatuhkan.

Perkembangan praktik penyederhanaan partai politik telah meluas menjadi pembubaran, pelarangan dan pembatasan partai politik. Alasan pembubaran partai politik pada masa demokrasi terpimpin adalah terkait ideologi, dasar dan tujuan negara, serta ancaman terhadap keamanan dan keutuhan wilayah negara. Ideologi yang di anut demokrasi terpimpin adalah konsepsi nasakom yang memadukan unsur Nasionalis, Agamis, dan Komunis.

Pada awalnya Masyumi, PNI, dan PSI merupakan pilar pemerintahan. Ketiga partai tersebut secara bergantian memegang tampuk kepemimpinan dan selalu menempatkan tokoh-tokohnya ke dalam kabinet. Bahkan ketiga partai itu saling bahu-membahu menghadapi oposisi yang dilakukan PKI dan FDR yang berakhir dengan Peristiwa Madiun 1948. Posisi masyumi dan PSI mulai bergeser pada saat PKI mulai bangkit dan mempengaruhi pandangan Presiden Soekarno yang hendak menyatukan seluruh kekuatan negara dari unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pertentangan antara Presiden Soekarno dengan Masyumi dan PSI semakin terbuka saat kedua partai tersebut menolak demokrasi terpimpin untuk menggantikan demokrasi parlementer. Penolakan juga terjadi pada saat dibentuknya kabinet karya yang tidak memperhatikan kekuatan dalam parlemen yaitu Kabinet Djuanda yang diumumkan pada 8 april 1957.

Dengan menghembuskan isu revolusioner Presiden Soekarno kerap melakukan tindakan di luar konstitusi. Termasuk membunuh hak demokrasi Partai Masyumi dan PSI yang dianggap sebagai kekuatan yang menentang revolusi. Presiden Soekarno tidak sedikit pun memberikan ruang bagi Partai Masyumi untuk terlibat di dalam pemerintahan. Wakil-wakil Partai Masyumi tidak dimasukkan di dalam Kabinet Kerja, DPA dan Deppernas, kemudian disusul tindakan Soekarno yang membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 di bulan Maret 1960 dan pengumuman pembentukan DPR GR di bulan Juni 1960 yang didalamnya tidak satu pun perwakilan Partai Masyumi dan PSI sebagai anggota.

Klimaksnya Partai Masyumi dan PSI akhirnya harus dibubarkan melalui Penpres No.7/59 dan Keppres No.200/60 dan Keppres No.201/60. Hal ini lebih disebabkan atas kegigihannya memperjuangkan hak-hak demokrasi dengan melawan sistem tirani, dan sebagai konsekuensi dari sikap para pemimpinnya yang selalu menunjukkan vokal oposisi terhadap Soekarno.

Keadaan negara menjadi tidak stabil karena adanya berbagai perpecahan yang terjadi antara daerah dan pusat yang dilakukan PRRI dan Permesta. Beberapa tokoh dari Masyumi dan PSI terlibat dalam peristiwa PRRI semakin memperburuk citra kedua partai itu di pemerintahan. Beberapa tokoh yang terlibat adalah Moh Natsir, Burhanuddin Harahap, Syafrudin Prawiranegara, Sumitro Djoyohadikusumo, dan Des Alwi menyatakan sikap mendukung PRRI atas nama

³² Rosihan Anwar. *Pergolakan Politik Indonesia*. Op., Cit. Hlm

³³ Rusdi. *PSI dan Peran Kepolitikannya di Indonesia*. Op, Cit. Hal 224

pribadi bukan atas nama partai. Pimpinan Masyumi dan PSI di pusat sudah berusaha menjelaskan bahwa partai tidak terlibat memberikan bantuan dan dukungan kepada pemberontak. Namun Presiden Soekarno tetap bersikeras menyuruh pemimpin Partai Masyumi dan PSI untuk membubarkan partainya sebelum dinyatakan sebagai partai terlarang.

Keadaan ekonomi Indonesia juga melemah akibat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan operasi militer guna melumpuhkan kekuatan PRRI-Permesta. Bersamaan dengan itu Indonesia yang keluar dari anggota PBB akibat bersitegang dengan Malaysia tidak mendapatkan pinjaman dari IMF sehingga perekonomian nyaris ambruk.

Beberapa pemimpin Partai Masyumi dan PSI yang ikut dalam memberikan bantuan pada PRRI dengan mudah dapat ditangkap dan dipenjarakan. Namun tidak berhenti sampai disitu pimpinan Partai Masyumi di pusat juga mengalami hal yang sama pada tahun 1962 karena di anggap melakukan rapat rahasia di Bali yang bertujuan untuk melancarkan tindakan subversive dan berniat menggulingkan kekuasaan Soekarno. Para pemimpin PSI yang di tangkap adalah Sutan Sjahrir, Soebadio Sastrosatomo, dan Anak Agung Gede Agung sedangkan pemimpin Masyumi antara lain Prawoto Mangkusasmito, Yunan Nasution, Kyai Ansjari, dan Moh Roem.

SARAN

Melihat adanya tindakan Presiden Soekarno yang melanggar konstitusi pada masa berlakunya Demokrasi Terpimpin membuat kita harus belajar tentang demokrasi kerakyatan. Dalam negara yang demokratis, kebijakan mengenai penyederhanaan partai politik seharusnya diimbangi dengan situasi dan kondisi partai - partai yang ada, sehingga tidak ada unsur pemaksaan kehendak terhadap partai politik yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik baru diantara unsur-unsur politik. Partai politik diharapkan lebih dapat mewujudkan program-programnya dan tidak hanya janji dalam kampanye. Partai politik harus saling bekerjasama dan memahami perbedaan-perbedaan dalam rangka mewujudkan Indonesia demokratis. Partai yang melakukan oposisi itu berfungsi untuk pengawas dalam kebijakan yang di ambil pemerintah, tanpa adanya oposisi pemerintah akan bebas dalam melakukan kebijakan.

Pemerintah di masa lalu masih terjebak dalam isu - isu politik yang di hembuskan untuk memecah belah bangsa terutama yang dilakukan oleh PKI, jangan sampai pemerintah di era sekarang mengulang kesalahan pemerintah di era yang dulu. Setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, semoga tidak ada lagi intimidasi bagi siapapun yang ingin mengeluarkan pendapatnya untuk memajukan Indonesia.

Mahasiswa Program Sejarah sebagai generasi penerus bangsa diharapkan dapat menghargai perbedaan yang ada dan terbuka satu sama lain agar tercipta kerukunan dan menghindarkan terjadinya perpecahan. Karena perpecahan hanya akan

menghancurkan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Terbitan Sezaman

- Bintang Timur, Kamis 18 Agustus 1960
 -----, Kamis 21 Juli 1960
 Harian Abadi, Jumat 29 Juli 1960
 -----, 16 Juli 1960
 -----, 22 Juli 1960
 -----, 1 Agustus 1960
 -----, 17 Agustus 1960
 Koran Pikiran Rakyat, 6 Juli 1959
 -----, 3 April 1959
 -----, 14 April 1959
 -----, 22 April 1959
 -----, 23 September 1959
 -----, 27 Juni 1959
 Koran Merdeka, 17 Desember 1961
 -----, 12 Januari 1962
 Koran Nasional, 16 Juli 1960
 -----, 22 Juli 1960
 -----, 18 Agustus 1960
 -----, 19 Agustus 1960
 -----, 25 Agustus 1960

B. Undang - Undang

- Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959
 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959
 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1960
 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959
 Peraturan Presiden No. 25 tahun 1959
 Keputusan Presiden No. 200 tahun 1960
 Lembaran Negara RI No. 139 tahun 1960

C. Jurnal/Skripsi

- Skripsi. Rusdi. *Partai Sosialis Indonesia dan Peran kepolitikannya di Indonesia 1948-1960*. Universitas Indonesia. 1965
 Skripsi. Zaini Muslim Ahmad. *Sikap Politik Soekarno Terhadap Partai Masyumi pada Tahun 1957 - 1960*

D. Buku

- Ahmad Syafi'I Ma'arif. 1996. *Islam Dan Politik : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*. Jakarta: Gema Insani Press
 Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press
 Anwar Hardhono. 1997. *Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh Ke Belakang Menoleh Ke Depan*. Jakarta: Gema Insani Press
 BJ. Boland. 1985. *Pergumulan Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Press

- Deliar Noer. 1987. *Partai-partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti
- Fathurrohman. 2010. *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia : Tinjauan Historis Normatif Pembubaran Partai Politik Sesudah Dan Sebelum Terbentuknya Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press
- Feith, Herbert. 1995. *Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press
- Rusli Karim. 1993. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*. Cetakan ke 3. Jakarta: Rajawali Press
- Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Koiruddin. 2004. *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Legge, John D. 1985. *SUKARNO Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Sinar Harapan
- Mochamad Ali Safa'at. 2011. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan & Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Press
- Harvey Barbara Sillars.1984. *PERMESTA: Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta: GrafitiPress
- Phill M. Sulu. 2011. *PERMESTA Dalam Romantika, Kemelut & Misteri*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Huntington, Samuel P. 1994. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Asfar. 2006. *Pemilu & Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka
- PK Poerwantana. 1994. *Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rosihan Anwar. 1966. *Perjalanan Terakhir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir*. Jakarta: PT Pembangunan
- RZ. Leirissa. 1997. *PRRI PERMESTA : Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Silverio R.L. Aji Sampurno. 1995. *Latar Belakang Keluarnya Keppres Nomor 200 Tahun 1960 : Sekitar Pembubaran Masyumi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Tjiardjono B.D. 1959. *Kisah Pemberontakan Di Indonesia*.



UNESA
Universitas Negeri Surabaya